



Konflik Ambisi Kolonial Prancis dan Inggris di Sudan (Krisis Fashoda 1898)

Elisabeth Rumaropen

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Cenderawasih

*Email: eli340299@gmail.com

ABSTRACT (12pt Bold)

This historical study examines the diplomatic and colonial conflict between Britain and France during the late 19th century, focusing on the Fashoda Crisis of 1898. Utilizing the historical research method—encompassing heuristics, source criticism, interpretation, and historiography—this paper analyzes the geopolitical ambitions that drove European powers to compete for territorial dominance in Africa. Britain sought to establish a continuous "Cape-to-Cairo" corridor, while France aimed to build an east-west empire spanning from the Atlantic Ocean to the Red Sea. These opposing imperial strategies intersected in Sudan, where French forces under Captain Jean-Baptiste Marchand occupied Fashoda in July 1898, only to be confronted by British troops led by General Horatio Herbert Kitchener. Although the standoff brought both nations to the brink of war, French domestic vulnerabilities and British naval superiority ultimately compelled France to withdraw. The peaceful resolution of this crisis prevented armed conflict, reshaped international diplomacy, and paved the way for the 1904 Entente Cordiale, while firmly establishing British colonial dominance in Sudan through the 1899 Anglo-Egyptian Condominium agreement.

Kata Kunci: Fashoda Crisis, British Imperialism, French Colonialism, Scramble for Africa, Sudan

PENDAHULUAN :

Krisis Fashoda (Fashoda Crisis/Fashoda Incident) merupakan salah satu krisis diplomatik paling penting dalam sejarah imperialisme modern pada akhir abad ke-19. Peristiwa ini menjadi puncak persaingan kolonial antara Inggris dan Prancis di Afrika selama era *Scramble for Africa*. Meskipun tidak berkembang menjadi perang terbuka, krisis tersebut hampir memicu konflik bersenjata antara dua kekuatan besar Eropa sebelum akhirnya diselesaikan melalui jalur diplomasi. Dalam perkembangan selanjutnya, penyelesaian Krisis Fashoda justru menjadi titik balik yang membuka jalan bagi terciptanya *Entente Cordiale* tahun 1904, yang mengakhiri permusuhan panjang antara Inggris dan Prancis.

Ekksistensi wilayah Fashoda yang berada dekat dengan wilayah anak-anak sungai nil yang bisa menghubungkan wilayah Sudan dengan wilayah koloni di luar Sudan membuatnya menjadi

wilayah incaran imperialis. Motif utama penguasaan atas wilayah tersebut tentunya tidak jauh dari adanya potensi perekonomian dan kepentingan strategis bidang militer. Negara imperialis yang saat itu berusaha untuk memperebutkan daerah Fashoda adalah Inggris dan Perancis. Dengan menguasai daerah Fashoda, cita-cita Inggris untuk membangun jalur kereta api Cape (wilayah semenanjung timur Afrika) hingga Kairo dapat terwujud. Di pihak Perancis, Fashoda (dan daerah Ethiopia) merupakan daerah kunci untuk mewujudkan impian dalam membentuk Imperium Samudra ke Samudra (Darsiti Soeratman, 2012: 78).

Krisis Fashoda merupakan salah satu peristiwa diplomatik paling menentukan dalam sejarah hubungan internasional pada akhir abad ke-19. Walaupun berlangsung hanya beberapa bulan pada tahun 1898 dan tidak berkembang menjadi perang terbuka, dampaknya jauh melampaui sengketa mengenai sebuah pos kecil di tepi Sungai Nil. Krisis ini mengubah arah kebijakan luar negeri Inggris dan Prancis, memengaruhi konfigurasi aliansi di Eropa, mempercepat pembentukan blok-blok kekuatan menjelang Perang Dunia I, serta mengukuhkan dominasi kolonial Inggris di Afrika Timur Laut. Oleh karena itu, banyak sejarawan memandang Fashoda bukan sebagai akhir dari persaingan kolonial semata, tetapi sebagai titik balik dalam sistem diplomasi internasional pada era *High Imperialism*.

METODE :

Metode penelitian ini lebih berfokus pada metode penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan - tahapan dalam metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu sebagai berikut :

1. **Heuristik** adalah tahap menemukan dan mengumpulkan sumber - sumber sejarah yang mendukung penulisan ini. Peneliti mengumpulkan sumber penelitian ini dari berbagai media seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang mengkaji tentang Pariwisata di Hindia Belanda.
2. **Kritik sumber** adalah tahap menguji kredibilitas sumber tersebut sekaligus menilai apakah sumber tersebut lengkap atau ada bagian hilang. Pada tahap ini peneliti mulai menganalisis kelengkapan dari sumber-sumber yang sudah di kumpulkan
3. **Interpretasi** pada tahap ini akan dilakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh dari data yang valid. Tahap ini peneliti mulai memilah-milah sumber-sumber yang valid dan dapat di percaya dan relevan dengan permasalahan yang sedang di teliti
4. **Historiografi** merupakan tahapan terakhir tujuan dari tahap terakhir ini adalah menyajikan peristiwa sejarah yang benar-benar menceritakan fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi dan bukan cerita fiksi semata, selain itu penulisan ini dapat menyimpulkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakan Krisis Fashoda

Pada dekade 1880-an hingga awal abad ke-20, negara-negara Eropa berlomba memperluas wilayah kolonialnya di Afrika. Fenomena ini dikenal sebagai Scramble for Africa, yang dipercepat setelah Konferensi Berlin (1884–1885). Konferensi tersebut menetapkan prinsip effective occupation, yakni bahwa suatu negara hanya dapat mengklaim wilayah kolonial apabila mampu menunjukkan pendudukan dan administrasi yang efektif. Ketentuan ini mendorong Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Portugal, dan Italia melakukan ekspedisi militer maupun ilmiah untuk menguasai wilayah-wilayah pedalaman Afrika.

Dalam konteks tersebut, Inggris dan Prancis mengembangkan visi geopolitik yang saling bertentangan. Inggris menginginkan terbentuknya jalur kekuasaan kolonial yang membentang dari **Cape Town hingga Kairo (Cape-to-Cairo Route)**. Gagasan yang dipopulerkan oleh Cecil Rhodes ini bertujuan menghubungkan seluruh koloni Inggris di Afrika melalui jalur darat dan rel kereta api dari selatan menuju utara. Sebaliknya, Prancis merancang proyek kolonial yang membentang dari Samudra Atlantik menuju Laut Merah, yakni dari Senegal dan Afrika Barat hingga Djibouti di pantai timur Afrika. Jalur timur–barat tersebut akan menghubungkan seluruh koloni Prancis menjadi satu kesatuan geografis sekaligus menghambat ekspansi Inggris. Kedua proyek imperial ini secara geografis berpotongan di wilayah Sudan bagian selatan, khususnya di Fashoda (kini Kodok, Sudan Selatan), sehingga menjadikan kawasan tersebut sebagai titik strategis yang diperebutkan.

Kepentingan Inggris terhadap Sudan tidak hanya didasarkan pada ambisi kolonial, tetapi juga pada faktor ekonomi dan keamanan strategis. Setelah menduduki Mesir pada tahun 1882, Inggris memandang Sungai Nil sebagai urat nadi keberlangsungan Mesir. Penguasaan wilayah hulu Nil dianggap mutlak agar tidak ada kekuatan asing yang dapat mengendalikan aliran air menuju Mesir. Terusan Suez yang dibuka pada tahun 1869 semakin meningkatkan arti strategis Mesir bagi Inggris karena menjadi jalur utama menuju India. Oleh karena itu, setiap upaya Prancis untuk memperoleh posisi di sepanjang Sungai Nil dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan imperial Inggris di Timur Tengah dan Afrika Timur. Pandangan inilah yang kemudian mendorong pemerintah Inggris bersikap keras ketika ekspedisi Prancis memasuki wilayah Fashoda.

Di sisi lain, Prancis mengalami tekanan politik domestik setelah kekalahan dalam Perang Prancis–Prusia (1870–1871). Pemerintah Republik Ketiga berupaya memulihkan prestise nasional melalui ekspansi kolonial. Kelompok kolonialis seperti **Comité de l'Afrique Française** aktif mendorong pemerintah agar memperluas pengaruh Prancis di Afrika Tengah dan Lembah Nil Atas. Organisasi tersebut memainkan peranan penting dalam mendorong lahirnya "Chad Plan", yaitu strategi menghubungkan koloni-koloni Prancis di Afrika Barat dengan wilayah Sungai Nil. Ekspedisi yang dipimpin Jean-Baptiste Marchand merupakan implementasi langsung dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, Krisis Fashoda bukan sekadar konflik militer lokal, melainkan hasil dari kombinasi kepentingan ekonomi, politik, dan kelompok lobi kolonial di Prancis.

Pada 1885, pertentangan antara Mesir-Inggris di satu pihak dengan Sudan di pihak yang lain

telah berakhir dengan kemenangan kaum Mahdi dalam penyerbuan ke Khartoum. Inggris menderita kerugian dengan terbunuhnya Jenderal Charles Gordon beserta para tentaranya. Hal tersebut berbuntut pada jatuhnya kabinet Perdana Menteri Gladstone yang kemudian digantikan oleh Lord Salisbury. Tak lama berselang, tepatnya pada 1896, pemerintah Inggris memutuskan untuk mengirim suatu ekspedisi ke selatan dengan tujuan utama adalah Sudan. Penguasaan kembali Inggris atas Sudan dipandang sangat mendesak karena hal tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan penanaman modal kaum kapitalis, kepentingan irigasi di Mesir, ancaman dari negara Eropa lain yang telah menguasai daerah-daerah sekitar Sudan (Darsiti Soeratman, 2012: 78).

Pada saat yang nyaris bersamaan, Prancis juga mengirimkan pasukan ke Sudan. Pada tahun 1894, Prancis dan Jerman mengadakan suatu perjanjian yang mana salah satu isinya memungkinkan untuk memperluas wilayah Congo Prancis ke pedalaman Afrika. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Prancis di bawah Menteri Ribot dan Honotaur untuk mengirimkan suatu ekspedisi. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Liotard dengan misi menanamkan pengaruh di Bahr El-Ghazal dan apabila memungkinkan, daerah Nil juga. Meskipun demikian, ekspedisi tersebut tidak membawa hasil signifikan (Darsiti Soeratman, 2012: 79-80).

Penarikan kembali Liotard dilakukan oleh Prancis dan dikirimnya tim ekspedisi Inggris ke selatan terjadi pada tahun yang sama, tepatnya tahun 1896. Untuk menggantikan Liotard, Prancis mengirim tim ekspedisi di bawah pimpinan Kapten Jean-Baptiste Marchand yang turut serta bersamanya 213 orang Senegal dan 21 orang Prancis. Tugas dari tim ini adalah menanamkan pengaruh Prancis di Sudan. Prancis memiliki asumsi bahwa Sudan merupakan daerah bebas imperialis sejak jatuhnya Sudan ke tangan kaum Mahdi pada 1885 (Darsiti Soeratman, 2012: 80).

Ekspedisi Marchand sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1896 ketika Marchand meninggalkan Marseilles dan mendarat di Loango, daerah Afrika Barat. Perjalanannya ke timur sempat terhenti selama enam bulan karena adanya perlawanan dari suku pribumi dan masalah kesehatan yang dialami Marchand. Akhirnya, Marchand dapat meneruskan perjalanan ke Congo dan berhasil tiba di Bahr El-Ghazal. Setibanya di sana, dia mendirikan 10 pos dan Wau dijadikan markas besar. Perjalanan diteruskan hingga akhirnya pada 10 Juli 1898, mereka tiba di Fashoda dan berhasil mengibarkan bendera Prancis. Serangan dari kaum Mahdi dapat dihalau. Di Fashoda, Marchand menunggu kabar gembira dan bantuan dari pemerintah Prancis (Darsiti Soeratman, 2012: 81-82).

Sebenarnya, pemerintah Inggris-Mesir ingin sekali menguasai kembali Sudan. Hal yang menjadi penunda dalam penguasaan kembali atas Sudan adalah alasan-alasan keuangan negara yang masih menjadi pertimbangan Lord Cromer. Lord Cromer baru mantap untuk menyetujui saran pengiriman ekspedisi setelah Lord Salisbury dan Joseph Chamberlain (menteri tanah jajahan) meyakinkannya dengan adanya berita mengenai diplomasi Prancis-Ethiopia untuk menentukan Sudan dan dikirimnya ekspedisi ke Sudan oleh Prancis (Darsiti Soeratman, 2012: 80).

Pada tahun ketika Liotard ditarik oleh Prancis, Inggris mengirimkan ekspedisi yang dipimpin oleh seorang Sirdar (komandan pasukan Inggris di Mesir) yang bernama Sir Horatio Herbert

Kitchener. Tim ini berangkat pada Februari 1896 dan berhasil mencapai Dongola pada 23 September 1896. Di kota tersebut, mereka tidak mendapat perlawanan sedikitpun. Dengan mudah, kota ini dikuasai (Darsiti Soeratman, 2012: 81). Selaku seorang jenderal yang juga memiliki kemampuan sebagai seorang insinyur, Kitchener memperpanjang rel kereta api ke arah selatan dalam tahun 1897. Pembangunan rel kereta api ke selatan tersebut merupakan usaha untuk merealisasikan keinginan Cecil Rhodes (Darsiti Soeratman, 2012: 81). Para ahli memperingatkan Kitchener bahwa jalur kereta api tersebut tidak dapat dibangun, namun kenyataannya, Kitchener dapat membangunnya. Pembangunan rel kereta api pada masa tersebut selain ditujukan untuk kepentingan sipil (khususnya perekonomian) juga ditujukan untuk kepentingan militer seperti mengangkut pasukan, persenjataan dan logistik (Omdurman, Fashoda, and The French Connection: 8).

Pada April 1898, Kitchener bersama dengan pasukannya yang berjumlah 20.000 orang mencapai Atbara. Setibanya di Atbara, mereka mendapat perlawanan dari kaum Darwish (pengikut Mahdi). Kitchener beserta pasukannya berhasil mengalahkan mereka (Darsiti Soeratman, 2012: 81). Serangan dilanjutkan ke kota Omdurman, salah satu basis pengikut Mahdi. Di kota ini, Kitchener mendapat perlawanan yang sengit dari kaum Darwish. Dalam pertempuran tersebut (atau lebih tepatnya pembantaian) lebih dari 10.000 pengikut Mahdi terbunuh. Hal tersebut sangat logis mengingat dari segi persenjataan dan jumlah, para pengikut Mahdi kalah jauh (Omdurman, Fashoda, and The French Connection: 13). Para tokoh sentral kaum Mahdi seperti Khalifa 'Abd Allahi El-Tarishi dan Uthman Digna beserta ribuan pengikutnya menyelamatkan diri ke arah selatan, lalu ke barat. Dengan keadaan semacam itu, jalan untuk memasuki Khartoum telah bebas dari hambatan. Atas perintah dari Lord Cromer, pada bulan September 1898, bendera Mesir dan Inggris dikibarkan secara berdampingan di kota Khartoum (Darsiti Soeratman, 2012: 81).

Berita mengenai kemenangan Kitchener di Omdurman telah menyebar hingga ke tempat Kapten Marchand berada. Khartoum ditinggalkan oleh Kitchener menuju selatan dan sebelum mencapai Fashoda, ia mendapat surat berisi ucapan selamat dari Marchand atas kemenangannya. Selain ucapan selamat, surat tersebut juga berisi tentang perintah dari Perancis kepada Marchand untuk menduduki Bahr El-Ghazal, Meshra Er-Req, sebagian daerah sekitar sungai Nil Putih dan Fashoda yang telah diduduki sejak 10 Juli 1898 (A.B. Theobald dalam Darsiti Soeratman, 2012: 81).

B. Dampak dan Proses Penyelesaian Krisis Fashoda

Perjalanan Kitchener ke selatan menuju Fashoda sebenarnya merupakan perintah rahasia dari Perdana Menteri Salisbury. Surat yang dikirim oleh Marchand kepadanya telah mengungkapkan apa yang sebenarnya telah terjadi di Fashoda. Kitchener berangkat bersama pasukannya dengan tambahan tentara Sudan. Dia beserta semua tentaranya yang berjumlah sekitar 2.500 orang pergi menggunakan lima kapal uap yang dipersenjatai secara penuh. Hal tersebut dilakukan untuk mengusir Perancis.

Kitchener tiba di Fashoda pada 20 September 1898. Kedatangannya langsung membuat Inggris dan Perancis menghadapi suatu masalah yang rumit. Kitchener langsung bertemu dengan

Marchand dan di antara mereka terjadi pembicaraan mengenai masalah yang ada. Pembicaraan yang sebenarnya memiliki peluang untuk memicu perang dan bersifat menegangkan ternyata berjalan secara ramah di antara mereka. Kitchener mengatakan pada Marchand bahwa dia ditugasi pemerintah Inggris untuk mengambil kembali Fashoda. Marchand menjawab bahwa dikarenakan Fashoda merupakan tanah yang mengalami pemberontakan terbuka maka setiap negara berhak untuk melakukan klaim atasnya. Marchand menambahkan bahwa dirinya tetap akan berada di Fashoda sampai ada perintah dari pemerintah Perancis untuk mundur. Kedua pimpinan tersebut menyetujui hal itu dan masalah Fashoda diserahkan kepada masing-masing negara yang bersangkutan.

Di London, Perdana Menteri Salisbury memimpin negosiasi. Keberadaan negara penyangga, keadaan politik dan pengaruh lingkungan mendasari pandangan Salisbury dalam kebijakan luar negeri. Dia menemukan suatu kehati-hatian dari Kerajaan Inggris dalam berbagai kebijakan luar negeri dimana masuknya Kerajaan Inggris dalam suatu aliansi (persekutuan) hanya dilakukan pada masa-masa perang saja dan ia merasa adalah tidak bijak untuk menciptakan suatu aliansi baik jangka panjang maupun jangka pendek di masa damai hanya karena betapa singkatnya tujuan dari pembentukan aliansi tersebut.

Dia selalu menyandarkan ancamannya dengan kekuatan militer dimana dalam kasus Fashoda, negara adidaya Perancis menginginkan suatu kerajaan di hulu sungai Nil. Pemerintah Inggris memegang hal-hal vital dimana pasukan Marchand kalah jumlah sementara pasukan Inggris menguasai sungai Nil yang mana memungkinkan mereka untuk membuat kebutuhan pasukan Perancis tersendat. Salisbury menolak untuk masuk perundingan hingga Marchand dan pasukannya ditarik pergi dari Fashoda. Ancaman mobilisasi Angkatan Laut Inggris memaksa Perancis untuk mengalah dan pada 2 November 1898, Marchand mendapat perintah untuk pergi dari Fashoda. Peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai akhir dari krisis Fashoda.

Sepeninggal Perancis dari Fashoda, muncul masalah baru mengenai kepemilikan Sudan. Apabila diserahkan kepada Mesir, maka Mesir, Turki dan negara-negara besar di Eropa selain Inggris akan senang. Perancis yang kalah dalam penyelesaian sengketa tersebut akan merasa lega dengan kepemilikan Mesir atas Sudan. Tetapi apabila Sudan menjadi milik Inggris, Inggris akan sangat senang dan hak-hak bangsa Eropa di Sudan terjamin. Namun hal tersebut merupakan tindakan perampasan hak Mesir yang juga justru memunculkan keruwetan dalam hubungan politik dengan Perancis di kemudian hari (Darsiti Soeratman, 2012: 86).

Pada akhirnya, kesepakatan dengan Mesir berhasil dicapai. Perjanjian yang disebut *Comdominium Agreement* ditandatangani pada Januari 1899 sebagai wujud kesepakatan Mesir-Inggris. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada 2 Agustus 1898, Perdana Menteri Salisbury menyampaikan saran kepada Lord Cromer yang pada intinya berisi mengenai pengibaran bendera Mesir dan Inggris di Sudan secara berdampingan. *Comdominium Agreement* merupakan realisasi dari saran tersebut (Darsiti Soeratman, 2012: 86).

Dengan perjanjian tersebut, Sudan diperintah oleh Mesir dan Inggris. Sirdar H.H. Kitchener

ditunjuk selaku gubernur jenderal di Sudan. Perlawanan di beberapa tempat masih tetap berlangsung. Hingga pada akhir 1899, Khalifa ‘Abd Allahi El-Tarishi meninggal dan Sudan dapat dikuasai sepenuhnya oleh Inggris (Darsiti Soeratman, 2012: 86). Pada 21 Maret 1899, Inggris dan Perancis menandatangani perjanjian yang membagi batas-batas wilayah antara Mesir-Inggris dan Sudan serta wilayah Perancis. Untuk sementara waktu, masalah teratasi. Walau bagaimanapun, Perancis berusaha mencari cara untuk meruntuhkan kontrol Inggris atas Mesir.

KESIMPULAN DAN SARAN:

Krisis Fashoda berawal dari adanya bentrokan kepentingan antara Inggris dengan Perancis. Lepasnya Sudan dari Mesir ke tangan kaum Mahdi dan tewasnya Jenderal Charles Gordon yang terjadi pada 1885 memaksa Inggris untuk melakukan “balas dendam”. Motif sebenarnya bukanlah semata-mata balas dendam atas kekalahan yang diderita, namun untuk memenuhi tuntutan kaum kapitalis, kepentingan irigasi dan persaingan pengaruh antar negara imperialis. Maka dari itulah usaha untuk merebut kembali Sudan diupayakan.

Ternyata Inggris terlambat dalam pengiriman utusannya. Perancis telah lebih dulu mengirim Kapten Marchand yang berhasil mendirikan basis di Bahr El-Ghazal dan yang terpenting dari Sudan, Fashoda. Keterlambatan yang dialami Inggris tersebut secara teknis sebenarnya tidak masalah mengingat pasukan Inggris-Mesir yang ada di bawah pimpinan Jenderal Kitchener memiliki jumlah yang besar, persenjataan yang canggih dan telah menguasai akses sungai Nil. Sementara di pihak Perancis, jumlah pasukan sedikit, logistik sewaktu-waktu dapat diblokade oleh Inggris dan yang utama, negeri tersebut sedang mengalami keruwetan di dalam negeri. Namun yang menjadi dilema adalah kedua negara tersebut dan bahkan negara-negara Eropa bisa terlibat perang hanya karena masalah wilayah bernama Fashoda.

Negosiasi antara Kitchener dan Marchand berakhir tanpa solusi dan keputusan diserahkan kepada Inggris dan Perancis. Di pihak Inggris, Perdana Menteri Salisbury tidak mengambil keputusan apapun terkait keikutsertaan Inggris dengan aliansi-aliansi yang terbentuk. Di pihak Perancis, berbagai masalah dalam negeri yang memiliki efek dalam kebijakan luar negeri seperti Dreyfu’s *affair* ditambah dengan ketidaksiapan militer Perancis apabila harus berperang melawan Inggris membuat Perancis harus mengalah. Dalam hal ini, Inggris keluar sebagai pemenang. Perancis menarik diri dari Sudan. Batas-batas wilayah antara Mesir-Inggris dan Sudan dengan wilayah Perancis diputuskan pada 1899. Di tahun yang sama, status Sudan telah ditetapkan dengan Mesir dan Inggris sebagai pemegang kekuasaan di Sudan. Kaum Mahdi juga kehilangan pengaruhnya pada tahun yang sama dengan meninggalnya Khalifa ‘Abd Allahi El-Tarishi. Praktis, Inggris dapat menguasai Sudan secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cain, P.J. & Hopkins, A.G. (2014). *British Imperialism 1688–2015*.
- Bates, Darrell. (1984). *The Fashoda Incident of 1898: Encounter on the Nile*. Oxford University Press.
- Mangold, Peter. (1984). *The Almost Impossible Ally: Harold Nicolson and Anglo-French Relations*. Oxford University Press.
- Pakenham, Thomas. (1991). *The Scramble for Africa*. Random House.

Artikel Jurnal

- Cockfield, J. (1983). Germany and the Fashoda Crisis, 1898–99. *Central European History*, 16(3), 256–275. doi:10.1017/S0008938900013959
- Eubank, K. (1960). The Fashoda Crisis Re-examined. *The Historian*, 22(2), 145–162. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6563.1960.tb01649.x>
- Eyssette, J. (2025). The Tribulations of the Fashoda Complex Theory: Origins, Apex and Obsolescence. *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 53(2), 270–296. <https://doi.org/10.1080/03086534.2025.2479815>
- Roberts, T. W. (2021). THE COMITÉ DE L'AFRIQUE FRANÇAISE, THE CHAD PLAN, AND THE ORIGINS OF FASHODA. *The Historical Journal*, 64(2), 310–331. doi:10.1017/S0018246X20000023
- Tvedt, T. (1992). The Race to Fashoda: Robinson and Gallagher Revisited. *Forum for Development Studies*, 19(2), 195–210. <https://doi.org/10.1080/08039410.1992.9665917>

Tesis/disertasi

- Gandes Sekar Putri. 2011. *Krisis Fashoda (1898): Konflik Antara Inggris dan Perancis Dalam Memperebutkan Koloni di Sudan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.